

BAB IV

KESIMPULAN

Di Indonesia sendiri, sudah banyak aturan yang mengatur hak-hak perempuan baik dalam bentuk peraturan perundangan-undangan maupun berbagai kebijakan. Beberapa konvensi internasional diratifikasi oleh Indonesia yang kemudian diimplementasikan di kehidupan sehari-hari namun kenyataannya, masih banyak hak perempuan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di politik khususnya perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pihak saja. Ini merupakan proses panjang serta dibutuhkan kesadaran dari masyarakatnya sendiri tentang pentingnya kesetaraan gender.

KPPRI sebagai organisasi politik yang mewadahi perjuangan perempuan di tingkat pusat sejauh ini sudah menjalankan tugasnya dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan sebagai bentuk perwujudan dari Deklarasi Beijing. Upaya pertama ialah mendukung terjadinya fraksi balkon yang dilakukan oleh gerakan perempuan non-parlemen dan melakukan pemantauan serta mendesak berbagai pihak untuk memasukkan kuota keterwakilan perempuan di pemerintah, termasuk KPU dan Parpol sebagai perwujudan feminisme liberal.

Upaya kedua yang dilakukan KPPRI mengatasi isu ketidakadilan gender perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan ialah melakukan peningkatan kapasitas untuk bakal calon perempuan yang akan terlibat di pemerintahan. Peningkatan kapasitas yang dilakukan mencakup pelatihan dan diskusi agar bakal calon ini mampu bersaing ketika pemilu. Upaya ketiga yang

dilakukan KPPRI ialah melakukan kerjasama dengan cara *roadshow* ke pimpinan media massa untuk membantu KPPRI mewacanakan pentingnya kepemimpinan perempuan. KPPRI menyadari bahwa kekuatan besar yang dimiliki oleh media sangat besar, untuk mengubah perspektif masyarakat terhadap perempuan yang terlibat di politik melalui pemberitaan media yang pro terhadap perempuan.

Dimulai sejak tahun pemilu tahun 2009 hingga 2014, keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai angka 30%. terkait memasukan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parpol maupun pemilu sebagai Hal tersebut dikemukakan Lolly melalui banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti kentalnya budaya patriarki, beban ganda yang ditanggung perempuan yang terlibat di ruang publik, pergantian antar waktu anggota dewan, kasus korupsi hingga kemampuan perempuan itu sendiri. Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, KPPRI akan terus mengupayakan sebisa mungkin untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan karena melibatkan perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan berarti meruntuhkan hambatan budaya dan struktural dengan menunjukkan bahwa perempuan bisa mencapainya.

DAFTAR LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk KPPRI

- Tentang KPPRI
- Bagaimana upaya KPPRI sebagai wadah perjuangan bagi perempuan parlemen di tingkat pusat untuk mewujudkan hak perempuan dalam politik?
- Bagaimana upaya KPPRI dalam mewujudkan salah satu area kritis dalam Beijing Declaration yaitu perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan?
- Tantangan yang dihadapi KPPRI untuk mewujudkan hak perempuan dalam politik?
- Media apa saja yang digunakan KPPRI untuk mewujudkan hak perempuan dalam politik? Apakah media cetak, media sosial atau lainnya?
- Mengapa KPPRI menggunakan media tersebut untuk mewujudkan hak perempuan dalam politik?
- Apa dampak yang dirasakan dari penggunaan media tersebut dan kaitannya dengan mewujudkan hak perempuan dalam politik?
- Penjelasan terkait fraksi balkon?
- Siapa saja anggota fraksi balkon?
- Apakah fraksi balkon ada di setiap rapat parlemen atau hanya ketika rapat terkait isu-isu pro gender saja?
- Apa hubungan antara KPPRI dan fraksi balkon?
- Bagaimana sifat keanggotaan KPPRI?
- Peningkatan kapasitas seperti apa saja yang dilakukan KPPRI?

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Syamsiah. *Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing*. Jakarta: Forum Komunikasi LSM Untuk Perempuan, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 1997.
- Allen, Robert. "Organizational Politics." *California Management Review*, n.d.: 78-80.
- Bieniek, Adrienne Trier. *Feminist Theory and Pop Culture: Teaching Gender*. Rotterdam: Sense Publisher, 2015.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Ikrar Mandiriabadi, 2007.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publications, 2003.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Held, David. *A Globalizing World? Culture, Economic and Politics*. London: Routledge, 2000.
- Hermawan, Yulius Purwadi. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Katjasungkana, Nursyahbani, and Liza Hadiz. *Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan* . Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, n.d.
- O'Neil, Tam, and Pilar Domingo. *The Power to Decide: Women, Decision-Making and Gender Equality*. Shaping Policy for Development, London: Overseas Development Institute , n.d.
- Rasyidin, and Fidhia Aruni. *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Tong, Rosemarie. "Liberal Feminism." In *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, 15. North Carolina: Westview Press, 2014.

Jurnal

Cacciattolo, Karen. "Defining Organisational Politics." *European Scientific Journal*, 2014: 238-246.

DeFleur, and Rokeach. "Dependency Theory." *Jurnal Hikmah*, 2012: 4-5.

Rahmatunnisa. "Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia." *Jurnal Wacana Politik*, 2016: 90-95.

Sayuti, Hendri. "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)." *Menara Vol. 2 No. 1*, 2013: 41-47.

Wawancara

Suhenty, Lolly, interview by Feby Elvany Pangestika. *Bagaimana upaya KPPRI dalam mewujudkan salah satu area kritis dalam Beijing Declaration yaitu perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan?* (September 4, 2018).

Suhenty, Lolly, interview by Feby Elvany Pangestika. *Apa itu Fraksi Balkon?* (September 4, 2018).

Suhenty, Lolly, interview by Feby Elvany Pangestika. *Apa itu Fraksi Balkon? Penjelasan Mengenai Fraksi Balkon* (January 13, 2019).

Suhenty, Lolly, interview by Feby Elvany Pangestika. *Keanggotaan KPPRI seperti apa?* (January 13, 2019).

Suhenty, Lolly, interview by Feby Elvany Pangestika. *Peningkatan kapasitas seperti apa yang dilakukan KPPRI?* (January 13, 2019).

Suhenty, Lolly, interview by Feby Elvany Pangestika. *Tentang KPPRI* (September 4, 2018).

Website

- . *Goal 5: Gender Equality*. n.d.
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html> (accessed Desember 4, 2018).
 - . *Overview United Nations*. n.d. <http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/> (accessed Desember 4, 2018).
 - . *What We Do*. n.d. <http://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html> (accessed Desember 4, 2018).
 - . *Women Participations in Politics and Government in Indonesia: A Policy Paper*. -. <https://www.peacewomen.org/node/89807> (accessed September 20, 2018).
- Badan Pusat Statistik. *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2016*. n.d. <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/25/e9f97e642645640c15caf139/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2016.html> (accessed Juni 30, 2018).
- Beijing 20 UN Women. *Women in Power and Decision Making*. n.d. <http://beijing20.unwomen.org/en/infographic/decision-making> (accessed Desember 5, 2018).
- Inter-Parliamentary Union . *Gender Equality* . n.d. <https://www.ipu.org/our-work/gender-equality> (accessed Mei 18, 2018).
- Kaucus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. *Tentang KPP-RI*. n.d. <https://kppri.wordpress.com/about/> (accessed Juli 2018, 23).
- KEMENPPPA. *Glosary Perlindungan Perempuan*. n.d. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21> (accessed September 17, 2018).

- Nations, United. *Report of the Fourth World Conference on Women*. 1995.
<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf> (accessed April 17, 2018).
- Roumen, and Roumen Dimitrov. "Political Organisation." *Research Gate*. 2008.
https://www.researchgate.net/publication/258312233_Political_organisations (accessed November 18, 2018).
- Stanford Encyclopedia of Philosophy*. April 9, 2018.
<https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/> (accessed January 14, 2019).
- UN Women. *Commission on the Status of Women*. n.d.
<http://www.unwomen.org/en/csw> (accessed Desember 2018, 2018).
- United Nations Development Programme . *Goal 5: Gender Equality* . n.d.
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html> (accessed Desember 3, 2018).
- United Nations Development Programme. *What are the SGDs?* n.d.
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html> (accessed Desember 1, 2018).
- United Nations. *Funds, Programme, Specialized Agents and Others* . n.d.
<http://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/> (accessed Desember 4, 2018).
- Universal Declaration of Human Rights. *Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia*. n.d.
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz>
 (accessed Mei 17, 2018).
- Valentina, R. . *Apa Sesungguhnya Substansi Kuota 30%?* October 6, 2003.
<http://www.institutperempuan.or.id/?p=17> (accessed January 14, 2019).

Van Deth, Jan W. *What is Political Participation?* November 2016.
<http://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-68> (accessed January 14, 2019).

Victorian Equal Opportunity & Human Rights Commission. *Discrimination*. n.d.
<https://www.humanrightscommission.vic.gov.au/discrimination> (accessed November 27, 2018).

Young, Gwen K. *Why we need more women leaders?* 2016.
<https://edition.cnn.com/2016/07/29/opinions/women-rising-benefits-society-young/index.html> (accessed December 4, 2018).